

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi moneter yang mulai menghantam Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuat kinerja lembaga keuangan konvensional khususnya bank konvensional dan BPR konvensional mengalami kemunduran yang sangat drastis, bahkan beberapa bank konvensional harus dilikuidasi karena tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya terhadap nasabah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan suku bunga yang sangat tinggi. Bahkan hingga bulan Agustus 1998 suku bunga mencapai sekitar 41,24% dan laju inflasi mencapai sekitar 54,54%.¹

Sedangkan kondisi perbankan syariah di Indonesia yang mengawali karirnya sejak pertengahan tahun 1992 yang diawali oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia, pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 perbankan syariah tidak mengalami pergerakan yang negatif sama sekali. Hal itu dikarenakan Perbankan Syariah tidak tergantung dengan inflasi yang membuat tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menjadi sangat tinggi.

Setelah krisis moneter yang melanda hampir semua negara di dunia

¹ Data inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga tahun 1990-2003
www.bi.go.id/id/statistik/inflasi/nilai-tukar/tingkat-suku-bunga/documents/SPS%20Dec%232013.pdf (diakses pada 22 Desember 2016 pukul 17.11)

termasuk di Indonesia 1997-1998, dominasi perekonomian Indonesia digerakkan oleh bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 terdapat 55,2 juta usaha kecil menengah. Seluruh usaha tersebut memberikan kontribusi dalam PDB sebesar 57,9% dan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2%.²

Peran perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk menjembatani antara pemilik dana dan peminjam dana. Fungsi perbankan syariah dalam hal ini antara lain memberikan bantuan modal, pinjaman, kerjasama bisnis dan sebagainya tanpa bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kalinya oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sejak tahun 1992, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

²Kontribusi UKM pada Pendapatan Negara
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5774/Pertumbuhan-Ekonomi-Dorong-Ekspansi-UKM>
(diakses pada 22 Desember 2016 pukul 17.25)

(BPRS) sudah bisa merepresentasikan kemajuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini sudah dapat menjangkau masyarakat ekonomi mikro dan juga menengah yang ingin melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan semacamnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah asalnya.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin tahun semakin meningkat. Dilihat dari jumlahnya, jumlah bank dan jumlah kantor di seluruh wilayah Indonesia semakin bertambah. Artinya, kebutuhan akan BPRS di setiap wilayah semakin dibutuhkan perannya oleh masyarakat, khususnya masyarakat tingkat menengah dan bawah untuk membuka dan menjalankan kegiatan bisnis atau kegiatan semacamnya.

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang berorientasi pada profit. Namun hingga tahun 2016 masih banyak tantangan yang membelit. Hal ini dikatakan oleh ketua ikatan ahli ekonomi islam Indonesia (IAEI), Agustianto mingka:

“Masalah perbankan syariah seperti masalah permodalan, efisiensi, inovasi produk, SDM, teknologi, layanan dan jaringan, pendanaan (funding), kualitas aset, dan lainnya. Salah satu kasus yang harus segera diperbaiki adalah masalah permodalan.”³

³ Manajemen permodalan bank pembiayaan rakyat syariah (bag 1)
http://kompasiana.com/amp/maulanafiqi/manajemen-permodalan-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-bag-1_56960b25337b61acc (Diakses pada 7 April 2017 pukul 13.20 WIB)

Hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas beberapa BPRS yang ada. Beberapa BPRS masih bisa mendapatkan laba yang cukup dan bahkan naik dari tahun sebelumnya. Salah satu contohnya adalah BPRS Amanah Rabbaniah yang membukukan laba untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.1.126.684.000. Laba itu meningkat 13 persen dari tahun 2014 sebesar Rp.998.411.000. Meski demikian, laba ini belum memenuhi target tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.504.147.000.⁴

Hal ini berlaku umum pula untuk sebagian besar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia, banyak yang mengalami penambahan total profitabilitas namun masih belum bisa memenuhi target yang diberikan oleh manajemen bank pada awal periodenya masing-masing. Artinya, masih banyak masalah terkait sistem dan layanan yang akan berpengaruh terhadap operasional BPRS.

Tabel I.1 Data Jumlah Bank Dan Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tahun 2007-2015

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bank	114	131	138	150	155	158	163	163	165
Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	401	402	439	445

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI tahun 2015

⁴ Laba BPRS Amanah Rabbaniah naik 13 persen
www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2016/05/21/laba-bprs-amanah-rabbaniah-naik-13-persen-369676 (Diakses pada 7 April 2017 pukul 13.39 WIB)

Tabel I.2 Daftar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (per-provinsi) Periode Januari 2015

No	Nama Provinsi	Jumlah BPRS
1	Banten	8
2	DKI Jakarta	1
3	Jawa Barat	29
4	Jawa Tengah	26
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	12
6	Jawa Timur	28
7	NAD	10
8	Lampung	11
9	Sumatera Barat	7
10	Sumatera Selatan	1
11	Sumatera Utara	8
12	Kepulauan Riau	1
13	Provinsi Riau	3
14	Bengkulu	2
15	Kalimantan Tengah	1
16	Kalimantan Selatan	1
17	Kalimantan Timur	1
18	Bangka Belitung	1
19	Bali	1
20	NTB	3
21	Sulawesi Selatan	8
22	Maluku Utara	1
23	Papua	1
	Total	165

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI 2015

Peran Bank Perkreditan Rakyat sangat signifikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak memiliki modal untuk membuka usahanya sendiri. Namun yang masih menjadi masalah hingga saat ini adalah kepercayaan pelaku UMKM tersebut terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mereka lebih percaya dan *prefer* terhadap Bank konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang

menawarkan produknya dengan cara yang menarik. Produk-produk yang ada di BPRS belum bisa menyaingi produk-produk yang ada di BPR Konvensional.

Peran vital ini ditunjang dengan perkembangan dari BPRS yang semakin membaik dari tahun ke tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali peningkatan yang terjadi didalam BPRS mulai dari segi pendanaa, penyaluran, manajemen, bahkan hingga mencapai penyerapan tenaga kerja. Ketua DPP Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Syahril T. Alam Menyatakan:

“Setidaknya terdapat 4.582 tenaga kerja tersebar di seluruh Indonesia yang dapat ditampung oleh industri BPRS ini. Adapun pertumbuhan aset, berdasarkan data dari Bank Indonesia, hingga Februari 2013 asetnya telah mencapai Rp4,8 triliun.”

BPRS akan terus menambah kualitasnya dari berbagai bidang. Untuk melancarkan kegiatan operasional BPRS diperlukan tingkat permodalan bank yang baik, karena semakin tinggi modal BPRS maka akan memudahkan BPRS untuk melakukan kegiatan operasional seperti pemberian kredit, kerjasama antar lembaga dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Aturan mengenai tingkat permodalan BPRS untuk tahun 2016 belum rampung diselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya peraturan lama sudah tidak sesuai denga kondisi yang terjadi saat ini. Bahkan Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dhani Gunawan Idat, menilai ketentuan tersebut sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini. Beliau menuturkan :

“Peraturan lama hanya menentukan modal yang sangat kecil, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, misalnya untuk ibukota provinsi cukup Rp 1 miliar, ibukota kabupaten Rp 500 juta itu sama sekali sudah tidak cukup lagi dengan kondisi sekarang yang terus berkembang. Jadi modal minimum harus disesuaikan lagi dengan kondisi yang berkembang.”

Peraturan ini harus segera dirampungkan guna memperbaiki kualitas yang ada pada BPRS itu sendiri. Pasalnya, BPR Konvensional sudah memiliki aturan tentang permodalan. Pada tahun lalu OJK menerbitkan peraturan permodalan BPR Konvensional sesuai dengan zona wilayah, yaitu Zona 1 (DKI Jakarta) sebesar Rp 14 miliar, Zona 2 (provinsi di pulau Jawa dan Bali, dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) sebesar Rp 8 miliar, Zona 3 (ibukota provinsi di luar Jawa dan Bali) sebesar Rp 6 miliar, serta Zona 4 (wilayah lain, seperti Papua) sebesar Rp 4 miliar. Di tahun ini OJK telah menerima pengajuan pendirian BPRS sebanyak 11 unit, dimana sebagian besar pendiriannya berlokasi di daerah Sumatera dan daerah Jawa di luar Jakarta.⁵

Tren positif peningkatan kualitas BPRS ditandai dengan adanya peningkatan dari berbagai aspek. Per Juni 2015, OJK mencatat aset BPRS mencapai Rp 6,851 triliun, DPK Rp 4.099.039 dan pembiayaan Rp 5,562 triliun. Nilai itu naik dari periode yang sama di 2014 dimana aset BPRS mencapai Rp 5,933 triliun, DPK Rp 3,599 triliun, dan pembiayaan Rp 4,845 triliun. NPF per Juni 2015 naik jadi 9,25 persen dibanding Juni 2014 yang mencapai 8,18 persen. Begitu juga FDR, meningkat menjadi 135,68

⁵ Permodalan BPRS Akan Diperkuat
<http://keuangansyariah.mysharing.co/permodalan-bprs-akan-diperkuat/> (Diakses pada 26 Desember 2016 pukul 1.01 WIB)

persen dari 134,64 persen, BOPO menjadi 88,13 persen dari 87,51 persen. Sementara kecukupan modal (CAR) turun menjadi 21,73 persen dari 22,21 persen.⁶

Peningkatan jumlah bank dan kantor bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah simpanan mudharabah jenis deposito mudharabah yang merupakan proporsi terbesar dana pihak ketiga Bank Syariah yang meningkat rata-rata setiap tahun sebesar 33,5% dari tahun 2007 hingga tahun 2013.⁷

Tabel I.3 Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Per Juni 2016

(Juta Rupiah)	
Akad	2016
Akad Mudharabah	182.677
Akad Musyarakah	764.862
Akad Murabahah	4.927.903
Akad Salam	14
Akad Istishna	9.388
Akad Ijarah	7.508
Akad Qard	139.772
Multijasa	431.711

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI Periode Juni 2016

⁶ BPRS Optimistis Hadapi 2016

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/01/08/o0lpve317-bprs-optimistis-hadapi-2016> (Diakses pada 26 Desember 2016 pukul 1.14 WIB)

⁷ Proporsi harta di BPRS Indoensia

www.bi.go.id/statistik/harta/akad/BPRS/Documents/SPS%23Des%.pdf (Diakses pada 22 Desember 2016 pukul 21.20 WIB)

Untuk menghindari pembiayaan yang macet atau kesulitan dalam pengembalian pinjaman dari nasabah kepada pihak BPRS, maka BPRS memiliki beberapa pertimbangan untuk menerima dan menyetujui atau menolak memberikan pinjaman pembiayaan. Pertimbangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah meliputi faktor bank itu sendiri seperti *risk appetite*, terhadap suatu sektor, tingkat kredit macet, kurangnya modal, dan sebagainya ataupun faktor luar seperti *historical* nasabah dan juga strategi bisnis yang akan dilaksanakan.

Tingkat Resiko Pembiayaan BPRS pada akhir 2015 mengalami peningkatan rasio yang cukup tinggi menjadi 8,2 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar 7,9 persen⁸. Dari hasil diskusi industri, peningkatan ini dikarenakan adanya tunggakan angsuran pembiayaan nasabah-nasabah pada beberapa segmen usaha yang berpengaruh langsung oleh perlambatan ekonomi nasional seperti usaha pendukung industri besar, pengusaha berbasis komoditi perkebunan dan juga segmen pegawai swasta yang perusahaannya mengalami kebangkrutan atau pailit.

Tingkat besaran dana Pihak Ketiga dan Resiko Pembiayaan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat Jumlah Nasabah pada suatu BPRS. OJK Berencana untuk mentransformasikan semua Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada di Indonesia menjadi BPRS. OJK juga telah

⁸ Soal Tata Kelola BPRS Manfaatkan Regulasi yang Ada
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/04/15/o5mwe5317-soal-tata-kelola-bprs-manfaatkan-regulasi-yang-ada> (Diakses pada 26 Desember 2016 pukul 10.40 WIB)

menetapkan modal minimum BPRS sebesar Rp 6 miliar tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun baik dari [bank](#) atau pihak lain. Dan tentunya, dana tersebut tidak berasal dari bentuk pencucian uang atau semacamnya⁹. Selain itu ada beberapa syarat khusus lagi yang diminta oleh OJK seperti wajib menyesuaikan anggaran dasar, berbadan hukum, memenuhi syarat modal minimum, memenuhi ketentuan direksi dan dewan komisaris. Serta miliki infrastruktur dan SDM memadai.

Dampak dari kebijakan ini adalah jumlah BPRS akan meningkat drastis dan persaingan antar BPRS akan menjadi lebih ketat. Sedangkan untuk beberapa LKMS yang tidak dapat memenuhi syarat dari OJK, akan dibubarkan. Artinya, nasabah-nasabah yang ada pada LKMS tersebut akan berpaling kepada BPRS. Dengan demikian, jumlah nasabah BPRS yang meningkat ini akan mempengaruhi berbagai sektor akun laporan di BPRS tersebut. Seperti dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, penyertaan modal dan tentunya resiko kredit yang semakin tinggi.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas judul, “Pengaruh Tingkat Permodalan Bank, Resiko Kredit, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pulau Jawa”.

⁹ OJK Akan Wajibkan Lembaga Keuangan Mikro Jadi BPR
<http://jabar.tribunnews.com/2016/08/01/ojk-akan-wajibkan-lembaga-keuangan-mikro-jadi-bpr>
(Diakses pada 26 Desember 2016 Pukul 10.51 WIB)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi tingkat Profitabilitas suatu BPRS, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dibanding BPR Konvensional
2. Belum adanya regulasi permodalan BPRS yang sah dari OJK
3. Tingkat modal BPRS yang masih terbilang rendah
4. Jumlah simpanan dana pihak ketiga yang masih terbilang rendah
5. Resiko pembiayaan yang semakin meningkat pada sebagian besar BPRS

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya pengaruh tingkat permodalan Bank yang diukur dengan menggunakan rasio kecukupan modal (CAR); tingkat resiko kredit pembiayaan yang diukur dengan Tingkat Kesehatan Pembiayaan (NPF); dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diukur dengan tingkat penghimpunan dana dari masyarakat pada BPRS.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat permodalan Bank terhadap profitabilitas BPRS di Pulau Jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat Resiko kredit pembiayaan terhadap profitabilitas BPRS di Pulau Jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas BPRS Di pulau Jawa?

E. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan dari penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi dan juga memberi manfaat untuk memperdalam teori dibidang akuntansi syariah. Selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta juga dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam bidang ilmu yang sedang digeluti khususnya tentang teori akuntansi syariah.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian untuk kalangan mahasiswa yang tertarik untuk membahas topik mengenai faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi Profitabilitas dari suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi

profitabilitas suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Serta penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan tanggungjawab penuh.

Penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat agar beralih ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah karena dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi.